



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan ☎ (021) 727-97427 Fax (021) 727-97427

Nomor : *IK.01.03-OK/250*
Lampiran :

Jakarta, 17 Mei 2017

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

Perihal: Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di DIPA Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota TA. 2017

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (*National Slum Upgrading Program/NSUP* dan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2/NUSP-2*) TA 2017 dan dalam rangka menindaklanjuti :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1059/KPTS/M/2016 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 203/KPTS/M/2017 dan 311/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 110/KPTS/DC/2016 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor No 88/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Bersama ini kami sampaikan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah TA. 2017 beserta rincian daftar lokasi dan alokasi dengan ketentuan sebagai berikut :

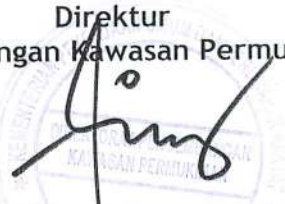
1. Kategori Bantuan Dana Investasi (BDI) NSUP Tahun 2017 :
 - a. Pelaksanaan NSUP TA 2017 akan mencairkan BDI Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh skala lingkungan, BDI Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Skala Lingkungan, BDI Penanganan Dampak Pasca Bencana di Kota Bima dan BDI Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan (Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas/PPMK);
 - b. BDI Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh skala lingkungan adalah BDI yang dialokasikan kepada kelurahan/desa yang memiliki permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/Walikota dan telah diverifikasi oleh Dit. PKP, DJCK Kementerian PUPR sesuai

dengan RPJMN 2015-2019 seluas 38.431 ha, pada Tahun Anggaran 2017 di 1.185 kelurahan/desa tersebar di 229 Kabupaten/Kota (*daftar Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi BDI ini terlampir pada lampiran surat*);

- c. BDI Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Skala Lingkungan adalah BDI yang dialokasikan kepada kelurahan/desa di luar lokasi permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/Walikota. Pagu BDI dialokasikan per kabupaten/kota dan selanjutnya penetapan alokasi per kelurahan/desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui proses seleksi kelurahan/desa (*mekanisme seleksi terdapat pada Petunjuk Operasional Standar Kolaborasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Skala Kota*);
 - d. BDI Penanganan Dampak Pasca Bencana di Kota Bima adalah BDI yang dialokasikan kepada kelurahan/desa yang terdampak bencana baik di lokasi permukiman kumuh maupun di lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Kota Bima (*daftar Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi BDI ini terlampir pada lampiran surat*);
 - e. BDI Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan adalah BDI untuk kegiatan penghidupan berkelanjutan (Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas) yang dialokasikan pada kelurahan/desa terpilih sesuai kriteria yang ditetapkan dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman kumuh (*daftar Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi BDI ini terlampir pada lampiran surat*).
2. Kategori Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) NUSP-2 Tahun 2017 adalah BPM yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan fisik peningkatan kualitas permukiman kumuh skala lingkungan di 209 kelurahan/desa yang tersebar di 20 kabupaten/kota (*daftar Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi BDI ini terlampir pada lampiran surat*);
 3. Tatacara pencairan BDI dan BPM mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 88/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman


Ir. Rina Farida, MT

NIP 195804051989032001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan);
2. Bupati dan Walikota di 250 Kabupaten/Kota;
3. Kepala Bappeda di 250 Kabupaten/Kota;
4. Kepala Dinas Atasan Langsung Satker PIP Kabupaten/Kota di 250 Kabupaten/Kota;
5. Kepala Satker PKP Provinsi di 33 Provinsi;
6. Kepala Satker PIP Kabupaten/Kota.

Lampiran 1. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman DJCK

Nomor : **IK.01.03-CK/250**

Tanggal : **17 Mei 2017**

Perihal : **Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di DIPA Satuan Kerja PKP Provinsi dan DIPA Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota TA. 2017**

DAFTAR TUJUAN SURAT

PROVINSI ACEH

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Selatan
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Tengah
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Barat
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Pidie
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Tamiang
7. Kepala Satker PIP Kota Banda Aceh
8. Kepala Satker PIP Kota Sabang
9. Kepala Satker PIP Kota Lhokseumawe
10. Kepala Satker PIP Kota Subulussalam
11. Kepala Satker PIP Kota Langsa

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Asahan
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Dairi
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Karo
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Deli Serdang
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Langkat
6. Kepala Satker PIP Kota Sibolga
7. Kepala Satker PIP Kota Tanjung Balai
8. Kepala Satker PIP Kota Pematang Siantar
9. Kepala Satker PIP Kota Tebing Tinggi
10. Kepala Satker PIP Kota Medan
11. Kepala Satker PIP Kota Binjai
12. Kepala Satker PIP Kota Padangsidempuan

PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Agam
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Lima Puluh Koto
4. Kepala Satker PIP Kota Padang
5. Kepala Satker PIP Kota Solok
6. Kepala Satker PIP Kota Sawahlunto
7. Kepala Satker PIP Kota Padang Panjang
8. Kepala Satker PIP Kota Bukittinggi
9. Kepala Satker PIP Kota Payakumbuh
10. Kepala Satker PIP Kota Pariaman

PROVINSI RIAU

1. Kepala Satker PIP Kota Pekanbaru
2. Kepala Satker PIP Kota Dumai
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Kuantan Singingi
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Indragiri Hilir
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Bengkalis

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Karimun
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Bintan
3. Kepala Satker PIP Kota Batam
4. Kepala Satker PIP Kota Tanjung Pinang

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Kepala Satker PIP Kota Palembang
2. Kepala Satker PIP Kota Prabumulih
3. Kepala Satker PIP Kota Pagar Alam
4. Kepala Satker PIP Kota Lubuk Linggau
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Ogan Komering Ulu
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Ogan Komering Ilir

PROVINSI JAMBI

1. Kepala Satker PIP Kota Jambi
2. Kepala Satker PIP Kota Sungai Penuh
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PROVINSI BENGKULU

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong
3. Kepala Satker PIP Kota Bengkulu

PROVINSI BANGKA BELITUNG

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Bangka
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Belitung
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Belitung Timur
4. Kepala Satker PIP Kota Pangkal Pinang

PROVINSI LAMPUNG

1. Kepala Satker PIP Kota Bandar Lampung
2. Kepala Satker PIP Kota Metro
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Pringsewu
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Lampung Utara

PROVINSI BANTEN

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Lebak
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Tangerang
4. Kepala Satker PIP Kota Tangerang
5. Kepala Satker PIP Kota Tangerang Selatan
6. Kepala Satker PIP Kota Cilegon
7. Kepala Satker PIP Kota Serang

PROVINSI JAWA BARAT

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Sukabumi
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Cianjur
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Bandung
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Tasikmalaya
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Majalengka
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Satker PIP Kabupaten Karawang
8. Kepala Satker PIP Kota Bogor
9. Kepala Satker PIP Kota Sukabumi

10. Kepala Satker PIP Kota Bandung
11. Kepala Satker PIP Kota Cirebon
12. Kepala Satker PIP Kota Bekasi
13. Kepala Satker PIP Kota Depok
14. Kepala Satker PIP Kota Cimahi
15. Kepala Satker PIP Kota Tasikmalaya
16. Kepala Satker PIP Kota Banjar
17. Kepala Satker PIP Kabupaten Sumedang
18. Kepala Satker PIP Kabupaten Subang
19. Kepala Satker PIP Kabupaten Bandung Barat
20. Kepala Satker PIP Kabupaten Indramayu
21. Kepala Satker PIP Kabupaten Kuningan
22. Kepala Satker PIP Kabupaten Ciamis
23. Kepala Satker PIP Kabupaten Garut
24. Kepala Satker PIP Kabupaten Cirebon
25. Kepala Satker PIP Kabupaten Bekasi
26. Kepala Satker PIP Kabupaten Bogor
27. Kepala Satker PIP Kabupaten Pangandaran

PROVINSI JAWA TENGAH

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Cilacap
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Banyumas
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Banjar Negara
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Purworejo
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Wonosobo
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Magelang
7. Kepala Satker PIP Kabupaten Klaten
8. Kepala Satker PIP Kabupaten Karanganyar
9. Kepala Satker PIP Kabupaten Grobogan
10. Kepala Satker PIP Kabupaten Blora
11. Kepala Satker PIP Kabupaten Rembang
12. Kepala Satker PIP Kabupaten Kudus
13. Kepala Satker PIP Kabupaten Jepara
14. Kepala Satker PIP Kabupaten Demak
15. Kepala Satker PIP Kabupaten Temanggung
16. Kepala Satker PIP Kabupaten Pekalongan
17. Kepala Satker PIP Kabupaten Pemasang
18. Kepala Satker PIP Kabupaten Tegal
19. Kepala Satker PIP Kabupaten Brebes
20. Kepala Satker PIP Kota Magelang
21. Kepala Satker PIP Kota Surakarta
22. Kepala Satker PIP Kota Salatiga
23. Kepala Satker PIP Kota Semarang
24. Kepala Satker PIP Kota Pekalongan
25. Kepala Satker PIP Kota Tegal
26. Kepala Satker PIP Kabupaten Pati
27. Kepala Satker PIP Kabupaten Batang
28. Kepala Satker PIP Kabupaten Kebumen
29. Kepala Satker PIP Kabupaten Wonogiri
30. Kepala Satker PIP Kabupaten Boyolali
31. Kepala Satker PIP Kabupaten Semarang
32. Kepala Satker PIP Kabupaten Kendal
33. Kepala Satker PIP Kabupaten Sukoharjo

PROVINSI DI YOGYAKARTA

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Bantul
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Sleman
4. Kepala Satker PIP Kota Yogyakarta

PROVINSI JAWA TIMUR

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Pacitan
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Ponorogo
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Trenggalek
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Malang
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Lumajang
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Probolinggo
7. Kepala Satker PIP Kabupaten Pasuruan
8. Kepala Satker PIP Kabupaten Sidoarjo
9. Kepala Satker PIP Kabupaten Nganjuk
10. Kepala Satker PIP Kabupaten Magetan
11. Kepala Satker PIP Kabupaten Bojonegoro
12. Kepala Satker PIP Kabupaten Tuban
13. Kepala Satker PIP Kabupaten Lamongan
14. Kepala Satker PIP Kabupaten Gresik
15. Kepala Satker PIP Kota Kediri
16. Kepala Satker PIP Kota Blitar
17. Kepala Satker PIP Kota Malang
18. Kepala Satker PIP Kota Probolinggo
19. Kepala Satker PIP Kota Pasuruan
20. Kepala Satker PIP Kota Mojokerto
21. Kepala Satker PIP Kota Madiun
22. Kepala Satker PIP Kota Surabaya
23. Kepala Satker PIP Kabupaten Banyuwangi
24. Kepala Satker PIP Kabupaten Sumenep
25. Kepala Satker PIP Kabupaten Kediri
26. Kepala Satker PIP Kabupaten Tulungagung
27. Kepala Satker PIP Kabupaten Blitar
28. Kepala Satker PIP Kabupaten Bondowoso
29. Kepala Satker PIP Kabupaten Jombang
30. Kepala Satker PIP Kabupaten Mojokerto
31. Kepala Satker PIP Kabupaten Jember
32. Kepala Satker PIP Kabupaten Situbondo

PROVINSI BALI

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Gianyar
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Klungkung
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Buleleng
4. Kepala Satker PIP Kota Denpasar

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Lombok Tengah
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Lombok Timur
3. Kepala Satker PIP Kota Mataram
4. Kepala Satker PIP Kota Bima
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Lombok Barat
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Sumbawa

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Sumba Barat
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Sumba Timur
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Ende
4. Kepala Satker PIP Kota Kupang
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Timor Tengah Selatan
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Belu
7. Kepala Satker PIP Kabupaten Sikka
8. Kepala Satker PIP Kabupaten Ngada
9. Kepala Satker PIP Kabupaten Manggarai

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Sambas
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Bengkayang
3. Kepala Satker PIP Kota Pontianak
4. Kepala Satker PIP Kota Singkawang
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Ketapang

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Kepala Satker PIP Kota Palangkaraya
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Kapuas

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Tabalong
5. Kepala Satker PIP Kota Banjarmasin
6. Kepala Satker PIP Kota Banjar Baru
7. Kepala Satker PIP Kabupaten Kota Baru
8. Kepala Satker PIP Kabupaten Banjar
9. Kepala Satker PIP Kabupaten Barito Kuala
10. Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Utara

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Paser
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Kutai Kertanegara
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Berau
4. Kepala Satker PIP Kota Balikpapan
5. Kepala Satker PIP Kota Samarinda
6. Kepala Satker PIP Kota Bontang

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. Kepala Satker PIP Kota Tarakan
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Malinau
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Nunukan

PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kepala Satker PIP Kota Manado
3. Kepala Satker PIP Kota Bitung
4. Kepala Satker PIP Kota Tomohon
5. Kepala Satker PIP Kota Kotamobagu
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Minahasa

PROVINSI GORONTALO

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Gorontalo
2. Kepala Satker PIP Kota Gorontalo

PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Poso
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Toli-Toli
3. Kepala Satker PIP Kota Palu

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Muna
2. Kepala Satker PIP Kota Kendari
3. Kepala Satker PIP Kota Bau-Bau
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Kolaka

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Selayar
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Bantaeng
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Sinjai
4. Kepala Satker PIP Kabupaten Maros
5. Kepala Satker PIP Kabupaten Wajo
6. Kepala Satker PIP Kabupaten Sidendreg Rappang
7. Kepala Satker PIP Kota Pare-Pare
8. Kepala Satker PIP Kota Palopo
9. Kepala Satker PIP Kota Makasar
10. Kepala Satker PIP Kabupaten Bulukumba
11. Kepala Satker PIP Kabupaten Bone
12. Kepala Satker PIP Kabupaten Pinrang
13. Kepala Satker PIP Kabupaten Toraja Utara
14. Kepala Satker PIP Kabupaten Gowa

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Majene
2. Kepala Satker PIP Kabupaten Polewali Mandar

PROVINSI MALUKU

1. Kepala Satker PIP Kota Ambon
2. Kepala Satker PIP Kota Tual
3. Kepala Satker PIP Kabupaten Maluku Tengah

PROVINSI MALUKU UTARA

1. Kepala Satker PIP Kota Ternate
2. Kepala Satker PIP Kota Tidore Kepulauan

PROVINSI PAPUA

1. Kepala Satker PIP Kota Jayapura

PROVINSI PAPUA BARAT

1. Kepala Satker PIP Kabupaten Manokwari
2. Kepala Satker PIP Kota Sorong